



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3318-3328

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukuman Pidana Dalam Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu Atau Menyesatkan

Andi Ervin Novara Jaya^{1✉}, Ilham Majid², Ricardo Goncalves Klau³

Ilmu Hukum, Universitas Musamus

Email: andiervin@unmus.ac.id^{1✉}

Abstrak

Analisis hukuman pidana dalam kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan mencakup evaluasi dampak hukuman terhadap keadilan, kesehatan masyarakat, dan integritas informasi kesehatan. Aspek-aspek kritis seperti proporsionalitas, asas legalitas, dan prinsip-prinsip hukum pidana menjadi fokus dalam memastikan efektivitas dan keadilan penegakan hukum. Kesimpulannya, penanganan hukum memerlukan keseimbangan antara hukuman yang sebanding dengan beratnya pelanggaran dan upaya pencegahan serta pendidikan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Penanganan hukum harus menggabungkan hukuman yang tepat dengan upaya pendidikan masyarakat dan peningkatan literasi kesehatan, memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan integritas informasi kesehatan yang akurat. Hukuman pidana, jika diterapkan dengan tepat, menjadi alat yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga integritas informasi kesehatan.

Kata Kunci: *Analisis Hukuman Pidana, Hukuman Pidana, Informasi Kesehatan Palsu, Penyebaran Informasi*

Abstract

The analysis of criminal penalties in cases of dissemination of false or misleading health information includes an evaluation of the impact of penalties on justice, public health, and the integrity of health information. Critical aspects such as proportionality, the principle of legality, and the principles of criminal law come into focus in ensuring the effectiveness and fairness of law enforcement. In conclusion, addressing the law requires a balance between punishment proportionate to the gravity of the offense and prevention and public education efforts. Collaboration between the government, health institutions, and law enforcement agencies is key to creating a safe and trusted environment for the public. Legal remedies should combine appropriate penalties with public education efforts and improved health literacy, ensuring the protection of public health and the integrity of accurate health information. Criminal penalties, when appropriately applied, become an effective tool in protecting public health and maintaining the integrity of health information.

Keywords: *Criminal Punishment Analysis, Criminal Punishment, False Health Information, Dissemination of Information*

PENDAHULUAN

Informasi kesehatan adalah elemen krusial dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang kesehatan, penyakit, dan upaya pencegahan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan tentang penyakit, tindakan pencegahan, pengobatan, hingga gaya hidup sehat. Di era informasi digital dan internet, akses terhadap informasi kesehatan semakin meluas, memungkinkan individu untuk mencari jawaban atas pertanyaan kesehatan mereka dengan cepat dan mudah. Namun, kebebasan tersebut juga membawa risiko, terutama karena penyebaran informasi kesehatan palsu atau tidak benar yang dapat menciptakan kebingungan, kekhawatiran, dan bahkan dapat membahayakan kesehatan publik secara keseluruhan (Adami et al., 2011).

Informasi kesehatan memainkan peran sentral dalam kehidupan modern, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era di mana teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah ke berbagai sumber, informasi kesehatan menjadi semakin dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Melibatkan aspek-aspek seperti pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, dan pola hidup sehat, informasi kesehatan membentuk dasar keputusan kesehatan yang diambil oleh individu dan keluarga.

Keberadaan internet dan media sosial telah memperluas cakupan informasi kesehatan, memungkinkan orang untuk mencari dan berbagi pengetahuan dengan cepat. Namun, dengan kenyamanan tersebut juga datang risiko serius, termasuk penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan. Informasi kesehatan yang tidak akurat dapat

menciptakan kebingungan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi, dan mengarah pada keputusan kesehatan yang tidak tepat (Aminah et al.,2019).

Lebih dari sekadar data dan fakta, informasi kesehatan mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti gaya hidup, lingkungan, dan genetika berinteraksi untuk memengaruhi kesehatan seseorang (Al-syamsi et al., 2019). Informasi ini bukan hanya tentang penyakit dan pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan kata lain, informasi kesehatan adalah fondasi bagi masyarakat yang berpengetahuan, memungkinkan mereka mengambil keputusan yang terinformasikan untuk merawat diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Dalam konteks global, informasi kesehatan juga memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks, termasuk pandemi dan wabah penyakit. Akses yang tepat dan akurat terhadap informasi kesehatan dapat mempercepat respons terhadap krisis kesehatan, meminimalkan penyebaran penyakit, dan mendukung upaya pencegahan yang efektif.

Dengan demikian, informasi kesehatan bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga sumber daya yang berharga untuk kesehatan individu dan masyarakat. Pentingnya untuk melindungi integritas dan keandalan informasi kesehatan menjadi semakin mendesak dalam menghadapi dinamika informasi digital yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa informasi kesehatan tidak hanya mencakup fakta medis semata, tetapi juga memasukkan dimensi psikologis, sosial, dan budaya. Bagaimana individu merespon informasi kesehatan, cara mereka menginterpretasikannya, dan bagaimana informasi tersebut memengaruhi perilaku kesehatan mereka adalah aspek penting dari pemahaman menyeluruh tentang informasi kesehatan. Oleh karena itu, penanganan informasi kesehatan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai konteks ini.

Di Indonesia, informasi kesehatan memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Akses terhadap informasi kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, terutama seiring dengan penetrasi internet yang semakin luas dan perkembangan media sosial. Masyarakat Indonesia kini dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi kesehatan, mulai dari situs web resmi kementerian kesehatan, platform kesehatan online, hingga akun-akun media sosial yang memberikan informasi terkini seputar Kesehatan (Putri et al, 2019).

Informasi kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam dinamika masyarakat yang beragam dan kondisi kesehatan yang berubah-ubah. Di

tengah kemajuan teknologi informasi dan penetrasi internet yang semakin luas, akses masyarakat terhadap informasi kesehatan telah meningkat secara signifikan. Platform daring, situs web pemerintah, portal kesehatan, dan media sosial menjadi sarana utama di mana individu mencari informasi tentang penyakit, pengobatan, nutrisi, dan gaya hidup sehat.

Namun, di tengah keterbukaan informasi kesehatan, terdapat pula tantangan serius terkait validitas dan akurasi informasi yang disajikan. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi kendala aksesibilitas terhadap informasi kesehatan berkualitas. Sementara di sisi lain, arus informasi yang tidak terverifikasi dengan baik dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesehatan.

Informasi kesehatan di Indonesia juga mencakup berbagai aspek, seperti informasi tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, gizi, vaksinasi, dan layanan kesehatan masyarakat. Sumber informasi tersebut tidak hanya bersumber dari lembaga resmi pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi dari lembaga kesehatan swasta, organisasi non-pemerintah, dan tenaga kesehatan independen.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, informasi kesehatan menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, memiliki tantangan tambahan terkait dengan pemberian informasi kesehatan yang relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor sosioekonomi, tingkat pendidikan, dan keragaman budaya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap informasi kesehatan dan implementasi praktik kesehatan.

Pentingnya informasi kesehatan di Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terutama, dalam situasi pandemi seperti yang dialami dengan COVID-19 misalnya, informasi kesehatan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku masyarakat, mendukung kebijakan pemerintah, dan memitigasi penyebaran penyakit (Albreta et al., 2021).

Dalam konteks ini, penting untuk terus mendorong keterbukaan informasi kesehatan yang berkualitas, mengedepankan literasi kesehatan masyarakat, dan memastikan bahwa sumber informasi yang diakses oleh masyarakat dapat dipercaya. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses, validitas, dan pemahaman terhadap informasi kesehatan di seluruh negeri. Sebagai bagian dari upaya ini, perlu diperhatikan pula bagaimana penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan dapat mengganggu upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan,

sehingga memperkuat urgensi untuk mempertimbangkan hukuman pidana sebagai langkah responsif dan preventif.

Dalam era digital yang terus berkembang, akses terhadap informasi kesehatan semakin mudah melalui berbagai platform online dan media sosial (Josua, 2012). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan. Fenomena ini bukan hanya sekadar risiko individu, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Informasi kesehatan yang tidak akurat dapat menciptakan kebingungan, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sumber informasi, dan, yang lebih serius, berdampak pada keputusan kesehatan individu dan kelompok.

Masalah penyebaran informasi kesehatan palsu memiliki konsekuensi yang luas, termasuk meningkatnya tingkat kepanikan di masyarakat, penurunan tingkat vaksinasi, serta persebaran pengobatan alternatif yang tidak teruji secara ilmiah. Selain itu, informasi kesehatan palsu dapat menciptakan lingkungan di mana pandemi atau wabah penyakit sulit dikendalikan karena penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap aspek hukuman pidana dalam menanggapi kasus penyebaran informasi kesehatan palsu menjadi penting untuk melindungi masyarakat, memelihara kepercayaan terhadap informasi kesehatan, dan menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi kesehatan melalui internet dan media sosial telah menciptakan lingkungan di mana informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat menyebar dengan cepat. Penyebaran informasi kesehatan palsu mencakup berbagai topik, mulai dari pengobatan ajaib hingga klaim kesehatan yang tidak berdasar ilmiah. Hal ini membawa konsekuensi serius, termasuk penurunan kepercayaan terhadap sumber informasi kesehatan, peningkatan risiko kesehatan masyarakat, dan gangguan terhadap upaya pencegahan penyakit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian yuridis empirisn yaitu dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau dengan berdasarkan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, selain itu metode ini juga akan melihat kenyataan yang ada dimasyarakat berdasarkan fakta objektif dilapangan baik itu berupa data atau pendapat yang berdasarkan pada identifikasi dan efektifitas hukum (Soerjono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu atau Menyesatkan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, menghadapi tantangan serius terkait dengan penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan dan keselamatan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya aksesibilitas teknologi informasi dan media sosial telah menjadi faktor pendorong utama penyebaran informasi kesehatan yang tidak valid di seluruh negeri.

Keberagaman latar belakang dan tingkat literasi yang berbeda di kalangan masyarakat Indonesia menjadi landasan subur bagi penyebaran informasi kesehatan palsu. Internet dan platform media sosial menjadi kanal utama di mana informasi ini dapat dengan cepat menyebar, terkadang tanpa validasi atau pengecekan yang memadai. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya pandemi global, seperti yang dialami dengan pandemi COVID-19, di mana informasi palsu dapat mengancam upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan lembaga Kesehatan (Putri et al., 2020).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola komunikasi, peran media sosial dalam menyebarkan informasi kesehatan semakin signifikan. Dalam beberapa kasus, informasi palsu disajikan dengan tampilan yang menyerupai berita resmi, mengaburkan batas antara fakta dan opini. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat sulit membedakan antara informasi yang dapat dipercaya dan yang seharusnya dicurigai.

Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dirilis oleh Kominfo periode Agustus 2018 - 31 Maret 2023 dengan temuan isu hoaks per kategori, isu hoaks yang paling banyak adalah isu yang berkaitan dengan Kesehatan, berdasarkan data temuan tim ais kementerian Kominfo tercatat menemukannya 2.256 isu beritas palsu atau menyesatkan yang termasuk dalam kategori Kesehatan. Berdasarkan hal ini ternyata meskipun transisi ke endemi sedang berlangsung namun kenyataannya masih banyak beredar isu yang berkaitan dengan Kesehatan khususnya berkaitan dengan Covid-19, baik itu mengenai virus ataupun vaksinasi. Selain berkaitan dengan Covid-19 juga ada banyak informasi yang palsu atau menyesatkan terutama hal yang berkaitan dengan khasiat tanaman, obat-obatan, dan produk Kesehatan lainnya (Kominfo, 2023).

Prinsip-prinsip Hukum Pidana dalam Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu atau Menyesatkan

Dalam kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan, prinsip-prinsip Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk menilai, menghukum, dan mencegah perbuatan

yang merugikan masyarakat (Maalik et al., 2021). Beberapa prinsip-prinsip Hukum Pidana yang relevan yaitu : (1) Asas Legalitas, asas legalitas adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa tindakan atau perilaku hanya dapat dihukum jika telah secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini mengandung dua aspek utama, yaitu bahwa perbuatan yang dapat dihukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu tindakan jika tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur tindakan tersebut. Beberapa hal penting dalam asas legalitas melibatkan beberapa hal seperti pengaturan dalam undang-undang, bahwa tindakan yang dapat dikenakan hukuman harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Artinya, tidak boleh ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas yang merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, selain peraturan perundang-undangan juga ada prinsip *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege* "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang."

Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum jika tidak ada undang-undang yang secara spesifik menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan dan menetapkan hukuman yang sesuai. Dengan mematuhi asas legalitas, penegakan hukuman pidana dalam kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan menjadi lebih adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan hukum. Ini juga memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum dan melindungi hak-hak individu sambil mengatasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya (2) Asas Kesalahan, asas kesalahan (*nullum crimen, nulla poena sine culpa*) adalah prinsip dalam hukum pidana yang menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dapat dibuktikan bahwa ia bersalah melakukan suatu tindakan yang melanggar undang-undang. Asas ini memiliki beberapa komponen penting terkait hukum pidana dalam penyebaran informasi Kesehatan palsu atau menyesatkan seperti eksistensi kesalahan, kesalahan yang dibuktikan, presumsi ketidakbersalahan, tidak boleh ada hukuman tanpa kebersalahan, dan kesalahan yang jelas dan tertulis dalam hukum.

Asas kesalahan adalah salah satu prinsip hukum pidana yang mendasar dan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang adil dan proporsional sehingga dengan demikian prinsip tersebut sangatlah relevan dengan analisis hukum pidana dalam kasus penyebaran informasi Kesehatan palsu atau menyesatkan. Terakhir, yang menjadi prinsip hukum pidana (3) Asas Proporsionalitas Hukum, asas proporsionalitas hukum memiliki peran yang sangat penting dalam konteks analisis hukum pidana, khususnya ketika diterapkan pada kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan. Analisis mendalam terhadap asas proporsionalitas ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang sejauh mana

hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya pelanggaran dan tujuan keadilan. asas proporsionalitas hukum dalam konteks kasus penyebaran informasi Kesehatan palsu atau menyesatkan membahas mengenai konteks kasus, tingkat bahaya dan dampak, pertimbangan faktor mitigasi dan aggravasi, tujuan preventif, perbandingan dengan kasus serupa, keseimbangan antara retribusi dan pencegahan, serta keamanan hukum dan hak individu (Moho dan Hasaziduhu, 2019).

Dampak Sosial

Penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan memiliki dampak sosial yang mendalam dan beragam terhadap masyarakat. Salah satu dampak utama adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Informasi yang tidak benar atau berlebihan mengenai suatu penyakit atau pengobatan dapat memicu ketidakpastian dan kepanikan, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk pengambilan keputusan yang rasional. Dalam konteks ini, kehilangan kepercayaan masyarakat pada sumber informasi kesehatan, seperti lembaga kesehatan, pemerintah, dan media, menjadi nyata. Hilangnya kepercayaan ini dapat merusak fondasi komunikasi kesehatan dan mempersulit upaya pencegahan dan penanggulangan.

Dampak selanjutnya adalah polarisasi opini dan perpecahan masyarakat. Penyebaran informasi palsu seringkali menciptakan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, mengakibatkan ketidaksetujuan dan konflik dalam masyarakat. Keadaan ini dapat melemahkan solidaritas sosial dan menghambat kerjasama dalam menghadapi tantangan kesehatan bersama-sama. Terlebih lagi, masyarakat yang terpapar informasi palsu cenderung menolak tindakan medis yang sah dan terbukti efektif. Hal ini dapat menyebabkan penundaan perawatan, meningkatkan risiko penyakit, dan berkontribusi pada beban penyakit yang dapat dicegah.

Dampak tersebut tidak hanya bersifat teoretis, melainkan juga menciptakan efek negatif langsung pada kesehatan masyarakat. Penolakan terhadap vaksin atau penggunaan obat-obatan alternatif yang tidak terbukti dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Fenomena ini terlihat dengan jelas dalam konteks pandemi global seperti COVID-19, di mana penyebaran informasi palsu dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan, membahayakan masyarakat secara luas.

Tidak hanya itu, penyebaran informasi kesehatan palsu juga menciptakan ketidakseimbangan dalam pemahaman ilmiah di masyarakat. Orang-orang dapat mengabaikan bukti ilmiah dan memilih untuk percaya pada informasi yang tidak teruji, merugikan upaya penyuluhan kesehatan dan pencegahan. Akibatnya, keputusan individu

terkait kesehatan mereka dipengaruhi oleh pandangan yang tidak berdasar pada fakta dan data ilmiah.

Dalam dimensi sosial yang lebih luas, penyebaran informasi kesehatan palsu dapat merusak hubungan antarindividu dan komunitas. Masyarakat yang terpecah belah berdasarkan keyakinan terhadap informasi palsu tersebut dapat menciptakan polarisasi sosial yang sulit diatasi. Solidaritas sosial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan bersama-sama dapat terkikis, meninggalkan masyarakat dalam keadaan rentan terhadap ancaman kesehatan.

Secara ekonomi, penyebaran informasi kesehatan palsu dapat menciptakan ketidakpastian dan kepanikan, berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Pengurangan kunjungan ke layanan kesehatan, penurunan produktivitas, dan biaya tambahan akibat konsekuensi kesehatan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Dengan demikian, penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Penanganan yang efektif melibatkan pendidikan masyarakat, pemberdayaan melalui informasi yang sahih, serta penegakan hukum untuk melindungi integritas informasi kesehatan dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Adam dan Ardi, 2011).

Dampak Kesehatan

Penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan memiliki dampak sosial yang mendalam dan beragam terhadap masyarakat. Salah satu dampak utama adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Informasi yang tidak benar atau berlebihan mengenai suatu penyakit atau pengobatan dapat memicu ketidakpastian dan kepanikan, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk pengambilan keputusan yang rasional. Dalam konteks ini, kehilangan kepercayaan masyarakat pada sumber informasi kesehatan, seperti lembaga kesehatan, pemerintah, dan media, menjadi nyata. Hilangnya kepercayaan ini dapat merusak fondasi komunikasi kesehatan dan mempersulit upaya pencegahan dan penanggulangan.

Dampak selanjutnya adalah polarisasi opini dan perpecahan masyarakat. Penyebaran informasi palsu seringkali menciptakan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, mengakibatkan ketidaksetujuan dan konflik dalam masyarakat. Keadaan ini dapat melemahkan solidaritas sosial dan menghambat kerjasama dalam menghadapi tantangan kesehatan bersama-sama. Terlebih lagi, masyarakat yang terpapar informasi palsu cenderung menolak tindakan medis yang sah dan terbukti efektif. Hal ini dapat

menyebabkan penundaan perawatan, meningkatkan risiko penyakit, dan berkontribusi pada beban penyakit yang dapat dicegah.

Dampak tersebut tidak hanya bersifat teoretis, melainkan juga menciptakan efek negatif langsung pada kesehatan masyarakat. Penolakan terhadap vaksin atau penggunaan obat-obatan alternatif yang tidak terbukti dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Fenomena ini terlihat dengan jelas dalam konteks pandemi global seperti COVID-19, di mana penyebaran informasi palsu dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan, membahayakan masyarakat secara luas.

Tidak hanya itu, penyebaran informasi kesehatan palsu juga menciptakan ketidakseimbangan dalam pemahaman ilmiah di masyarakat. Orang-orang dapat mengabaikan bukti ilmiah dan memilih untuk percaya pada informasi yang tidak teruji, merugikan upaya penyuluhan kesehatan dan pencegahan. Akibatnya, keputusan individu terkait kesehatan mereka dipengaruhi oleh pandangan yang tidak berdasar pada fakta dan data ilmiah.

Dalam dimensi sosial yang lebih luas, penyebaran informasi kesehatan palsu dapat merusak hubungan antarindividu dan komunitas. Masyarakat yang terpecah belah berdasarkan keyakinan terhadap informasi palsu tersebut dapat menciptakan polarisasi sosial yang sulit diatasi. Solidaritas sosial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan bersama-sama dapat terkikis, meninggalkan masyarakat dalam keadaan rentan terhadap ancaman Kesehatan (Mertha et al., 2016).

Secara ekonomi, penyebaran informasi kesehatan palsu dapat menciptakan ketidakpastian dan kepanikan, berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Pengurangan kunjungan ke layanan kesehatan, penurunan produktivitas, dan biaya tambahan akibat konsekuensi kesehatan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Dengan demikian, penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Penanganan yang efektif melibatkan pendidikan masyarakat, pemberdayaan melalui informasi yang sahih, serta penegakan hukum untuk melindungi integritas informasi kesehatan dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penanganan hukum terhadap fenomena ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keadilan, kesehatan masyarakat, dan integritas informasi kesehatan. Hukuman pidana yang diterapkan dalam konteks ini harus mempertimbangkan aspek-aspek kritis seperti proporsionalitas, asas legalitas, dan prinsip-prinsip hukum pidana. Penanganan

hukum terhadap penyebaran informasi kesehatan palsu memerlukan pendekatan yang seimbang antara hukuman yang efektif dan upaya pencegahan serta pendidikan masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan sehat bagi masyarakat. Hukuman pidana, ketika diterapkan dengan tepat, dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa informasi kesehatan yang disebarkan adalah akurat dan bermanfaat bagi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Banyumedia Publishing, Malang.
- Alberta, Bella, Eka Putri, Mahasiswa Magister, Ilmu Hukum, And Universitas Lampung, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax Covid -19 Melalui Media Sosial Bella Alberta Dan Jeslin Eka Putri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung", Vol. 5, No. 1, 2021.
- al-Syamsi, Ray Habib, R B Sularto, Fakultas Hukum, And Universitas Diponegoro, "Politik Kriminal Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan) Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. November 2019, 317–350.
- Aminah. Sari, Novita, "Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula", Jurnal Komunikasi Global, Vol. 8, No. 1, 2019, 51–61.
- I Ketut Mertha et. al., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta
- Maaliki, Naavi'u Emal, And Eko Sopyonyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2021, 59–69.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", Warta Edisi 60, No. April 2019: 91–96.
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, And Tomy Michael, "Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19", Jurnal Ilmu Hukum Ii, No. 1, 2020, 14-23.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.